

# KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN KAO BARAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA

HENI H. NGETJE

JOORIE M. RURU

NOVVA N. PLANGITEN

[heny7926@gmail.com](mailto:heny7926@gmail.com)

## SUMMARY

*The purpose of this study is to find out how the coordination of local governments in the development of road infrastructure in the West Kao District, North Halmahera Regency. This research uses a descriptive-qualitative approach. Based on the study of coordination theory seen from four indicators, namely: coordination through authority, coordination through consensus, coordination through work guidelines, and coordination through one forum. The informants of this study were 1 person Bappeda Head, 1 person Bappeda Secretary, 1 person Bappeda Officer, 2 PUTR Offices, West Kao Sub-district Head and 1 West Kao Sub-district community. The data analysis technique used is an interactive model analysis of Miles and Huberman. The results showed: (1) The coordination of the regional government in the construction of the road infrastructure in the West Kao Subdistrict, North Halmahera Regency was seen from the coordination through the authority that had run quite well. (2) Seen from the coordination through consensus in the construction of road infrastructure in West Kao District, North Halmahera Regency has also not run optimally. (3) Coordination of local government in the construction of road infrastructure in West Kao Subdistrict, North Halmahera Regency, seen from the coordination through work guidelines, has been running quite well, seen from the cooperation between the sub-district government, Bappeda, and the PUTR Office. (4) Coordination through a forum is good enough seen from the government's work plan in which there is Musrembang.*

*Keywords: Coordination, Development, Road Infrastructure.*

## RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Berdasarkan kajian teori koordinasi dilihat dari empat indikator yaitu: koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, dan koordinasi melalui satu forum. Informan penelitian ini adalah Kepala Bappeda 1 orang, Sekretaris Bappeda 1 orang, Pegawai Bappeda 1 orang, Dinas PUTR 2 orang, Camat Kao Barat dan masyarakat kecamatan Kao Barat 1 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Koordinasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara dilihat dari koordinasi melalui kewenangan sudah berjalan cukup baik. (2) Dilihat dari koordinasi melalui konsensus dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara juga belum berjalan secara optimal. (3) Koordinasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara dilihat dari koordinasi melalui pedoman kerja sudah berjalan cukup baik dilihat dari kerjasama antar pemerintah kecamatan, Bappeda, dan Dinas PUTR. (4) Koordinasi melalui satu forum sudah cukup baik dilihat dari rencana kerja pemerintah yang di dalamnya ada Musrembang.

**Kata Kunci:** Koordinasi, Pembangunan, Infrastruktur Jalan.

## PENDAHULUAN

Koordinasi merupakan suatu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu bidang pembangunan yang sangat penting dan mutlak ditingkatkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah adalah pembangunan jalan. Dalam hal ini jalan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Ketersediaan jalan yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing global. Transportasi jalan juga semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar-wilayah, antar-kota, dan antar desa, serta mempercepat pengembangan wilayah.

Kinerja sistem transportasi jalan raya agar bergantung pada seberapa besar daya dukung “jalan” yang mampu disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok dalam suatu sistem transportasi. Oleh karena itulah pembangunan jalan beroleh perhatian besar dan terus ditingkatkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparat, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Kao Barat adalah kategori” jalan

kabupaten” yaitu jalan yang pembangunan dan pemeliharaannya didanai oleh APBD Kabupaten Halmahera Utara. Jalan tersebut menghubungkan antar Kecamatan Kao Barat dan kecamatan lainnya di sekitar. Jalan yang ada di Kecamatan Kao Barat belum terlaksana dengan baik, karena sebagian masyarakat belum merasakan pembangunan infrastruktur jalan yang selayaknya sehingga dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara agar dapat menyelesaikan masalah pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Kao Barat, karena masyarakat Kecamatan Kao Barat masih sangat sulit melewati jalan umum yang dalam keadaan kurang baik.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagi pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu. Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetujui, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Talitudu Ndraha, 2003:290).

Menurut Handoko (2003:196) fungsi koordinasi yaitu karena adanya kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya.

Stoner dan Wankel (2006) menyatakan koordinasi sebagai proses pemaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan unit-unit yang

terpisah agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

### **Pembangunan Daerah**

Menurut Soetomo (2008), pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal.

Faikh Mansour (2001:10) mengatakan bahwa pembangunan merupakan kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.

Menurut Jhingan (2000) perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Kegiatan perencanaan pembangunan daerah meliputi pengembangan pembangunan infrastruktur yang mendukung jaringan struktur seperti jalan raya, jalan tol, jembatan layang, kereta api, pelayaran, bandara, air bersih, listrik, telekomunikasi dan yang lainnya. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja guna mengurangi

kemiskinan serta mengurangi tingkat pengangguran di suatu daerah.

### **Konsep Infrastruktur Jalan**

Definisi infrastruktur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik kapital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2003).

Robert J. Kodoatie (2005) mengatakan “Infrastruktur adalah sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, dimana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.”

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem infrastruktur merupakan hal yang selalu berkaitan dengan kehidupan masyarakat baik di dalam sistem sosial maupun sistem ekonomi guna untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara fisik dengan menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan dan fasilitas publik lainnya yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif. Husaini dan Purnomo (2009) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat informan apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi informan berperilaku seperti itu, direduksi, ditrianggulasi, disimpulkan, dan di verifikasi.

Menurut Moleong (2013) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara Holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian metodologi penelitian di atas bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara. Berdasarkan kajian teoritis tentang koordinasi pembangunan infrastruktur jalan, dipilih empat indikator yaitu koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, dan koordinasi melalui satu forum. Hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Koordinasi melalui kewenangan

Konsep koordinasi melalui kewenangan merupakan salah satu cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi yang efektif, namun disyaratkan adanya organisasi yang seragam. Menurut James D. Mooney (Sugandha, 2000), dasar dari prinsip koordinasi adalah kewenangan yang merupakan keharusan untuk mengkoordinasikan. Kewenangan ini digerakkan atau dijadikan berproses oleh koordinsdi prosesif (*processive coordination*) yang berupa semua kegiatan yang dirancang dalam rangka menciptakan kesatuan arah dan tindakan. Hasil proses ini berupa koordinasi yang berhasilguna (*effective coordination*) yaitu efek fungsionalnya dari koordinasi. Mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan secara botom-up mulai dari Musrembang desa, Musrembang kecamatan, dan Musrembang kabupaten; usulan program pembangunan jalan diusulkan dari desa yang dirumuskan dalam Musrembang desa, kemudian di bawah kedalam forum Musrembang kecamatan, dan kemudian diusulkan ketingkat kabupaten dalam Musrembang kabupaten. Kendala/hambatan dalam koordinasi perencanaan umumnya hanya kendala teknis.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang pasti bukan hanya pemerintah daerah saja yang turut ikut serta dalam melakukan tugas dan tanggungjawab, tetapi pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan dari masyarakat yang ada, jika dilihat dari segi waktu sudah maksimal namun dari segi biaya belum efisien karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga yang terjadi salah satu penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kao Barat dikarenakan kurangnya biaya dan

bukan kurangnya atau lemahnya koordinasi perencanaan di tingkat kabupaten.

## 2. Koordinasi melalui konsensus

Koordinasi melalui konsensus yaitu melalui motivasi sebagai kepentingan bersama, saling membutuhkan atau membantu, dan melalui ide. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa koordinasi pembangunan daerah di tingkat Kabupaten Halmahera Utara dalam proses perencanaan sudah berjalan dengan baik, namun dalam proses pelaksanaan belum berjalan dengan baik, karena belum semuanya pembangunan infrastruktur jalan yang sudah di selesaikan, namun jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya pembangunan infrastruktur jalan sangat sulit di lewati dengan kendaraan beroda empat karena pembangunan jalan yang kurang baik, jika dibandingkan dengan sekarang sudah banyak perkembangan yang kita lihat di Kecamatan Kao Barat meski belum semuanya terlaksana

## 3. Koordinasi melalui pedoman kerja

Koordinasi melalui pedoman kerja yaitu yang telah ditetapkan menyangkut tugas, wewenang, tata kerja serta prosedur kerja agar terdapat kesatuan gerak dan kesatuan tindakan yang tertuang dalam petunjuk/pedoman. Tahapan untuk perencanaan lewat Musrembang dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten, yang wajibnya terlibat bukan hanya pemerintah daerah saja, tetapi masyarakat juga perlu dilibatkan karena pemerintah daerah juga membutuhkan aspirasi dari masyarakat jadi bukan hanya pemerintah daerah yang turun langsung dan membawa aspirasi ke kecamatan dan kabupaten lalu selesai begitu saja, tetapi harus ada yang namanya stakeholder dan masyarakat yang harus terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Pelaksanaan ini bisa diserahkan ke pihak ketiga yaitu masyarakat, masyarakat juga ikut bekerja bahkan mengawasi karena pengawasan itu melekat pada masyarakat, jika pekerjaan tidak sesuai maka yang bersangkutan wajib lapor kepada yang berwenang maka akan di tindak lanjuti.

## 4. Koordinasi melalui satu forum

Koordinasi melalui satu forum yaitu penggunaan suatu wadah tertentu yang dapat dipergunakan sebagai cara mengadakan tukar menukar informasi, konsultasi memecahkan suatu masalah, serta hal-hal lain yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi yang bersangkutan. Dalam perencanaan pembangunan ada tahapan ada yang namanya tahapan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah top down maupun bottom-up, khususnya di wilayah kecamatan kao barat pemerintah daerah juga membutuhkan aspirasi dari masyarakat dan ada yang namanya musrembang desa, musrembang kecamatan dan musrembang kabupaten itu di rangkum dalam sebuah dokumen perencanaan, tetapi harus ada pengkajian atau analisa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam proses pembangunan daerah, yang pasti bukan hanya pemerintah daerah saja yang turut ikut serta dalam melakukan tugas dan tanggungjawab, tetapi pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan dari masyarakat yang ada, jika dilihat dari segi waktu untuk pembangunan infrastruktur jalan yang ada di wilayah kecamatan kao barat sudah maksimal namun dari segi biaya belum efisien karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga yang terjadi salah satu penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kao Barat dikarenakan

kurangnya biaya dan bukan kurangnya atau lemahnya koordinasi perencanaan pembangunan antar instansi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Koordinasi melalui kewenangan dalam proses pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Kao Barat sudah berjalan cukup baik, untuk kewenangan kabupaten sedangkan untuk kewenangan provinsi belum terlaksana sama sekali, untuk itu pemerintah kabupaten juga berharap agar kedepannya pemerintah provinsi bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai yang diharapkan masyarakat kecamatan Kao Barat.
2. Koordinasi melalui konsensus dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kao Barat harus ada kerjasama atau tindakan saling mendukung, menunjang, dan membantu pelaksanaan setiap program antar pemerintah kecamatan, SKPD, dan instansi vertikal belum berjalan secara optimal.
3. Koordinasi melalui pedoman kerja dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kao Barat ada kerjasama antar pemerintah kecamatan, Bappeda, dan Dinas PUTR untuk menyelaraskan, menghubungkan dan menyesuaikan program/kegiatan masing-masing instansi agar searah, sejalan, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih, ini juga belum berjalan secara optimal.
4. Koordinasi melalui satu forum pada proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan harus melalui Musrembang yaitu Musrembang desa, Musrembang kecamatan dan Musrembang kabupaten.

### **Saran**

1. Pemerintah daerah lebih memperhatikan program pembangunan infrastruktur jalan

yang belum berjalan secara optimal di Kecamatan Kao Barat.

2. Kerjasama pemerintah daerah antar unit-unit kerja dapat ditingkatkan dengan menciptakan forum kerjasama.
3. Program/kegiatan dapat ditingkatkan dengan mengatur bersama rencana program/kegiatan dan pelaksanaannya.
4. Pemerintah daerah lebih memperhatikan pembangunan yang ada di Kecamatan Kao Barat, khususnya pembangunan infrastruktur jalan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Christin D. S. 2015, *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat*, Manado. Unsrat.
- Faikh M. 2001, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Fauzyah R. 2017, *Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang*, Semarang. Undip.
- Handoko. 2013, *Manajemen*, Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas, BPFE. Yogyakarta.
- Husaini. U dan Purnomo S. A. 2009, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Jhingan. 2000, *Tujuan Pokok Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Makro Ekonomi. Jakarta.
- Kodoatie. R. J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mankiw, N. G. 2003, *Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.

- Ndraha T. 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta. Rineke Cipta
- Rico B. T. 2018, *Implementasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Munte Kecamatan Munte Kabupaten Karo, Sumatra*. USU.
- Soetomo. 2008, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stoner L. J. dan Charles W. 2006, *Manajemen*, Jakarta. terjemahan, Intermedia.
- Sugandha D. 2000, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Sumber Lain:
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.